

## BAB VI

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Jawa Timur 2014-2019. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi dilaksanakan berpedoman pada "payung besar" strategi umum yang menjadi landasan utama pembangunan Jawa Timur 2014-2019.

#### VI.1 Strategi Umum

Untuk mewujudkan visi "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak", melalui lima misi dalam bingkai "Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik", dilakukan berlandaskan tiga strategi umum, sebagai berikut:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*).
2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor growth*), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth*, dan *pro-environment*.
3. Pengarusutamaan gender (*pro-gender*).

Ketiga strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Jawa Timur 2014-2019, sebagai kelanjutan dari pembangunan periode 2009-2014, dengan penegasan mengenai inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), bahwa pembangunan Jawa Timur adalah

pembangunan untuk semua, tanpa kecuali, yang secara implisit di dalamnya mengandung makna pembangunan yang berkeadilan, dan merata.

Strategi umum pembangunan Jawa Timur 2014-2019 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya (*affirmative*) kepada rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, atau disebut *pro-poor growth* (Dollar and Kraay, 2000), yang dilandasi pemikiran bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (*trade-off*) satu terhadap lainnya. Penegasan keberpihakan ini sejalan dengan label misi "Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik", di mana *wong cilik* atau rakyat miskin tidak boleh tertinggal atau ditinggalkan dalam memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Penjelasan lebih rinci mengenai ketiga strategi umum tersebut adalah sebagai berikut:

### **VI.1.1 Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat**

Strategi pembangunan berpusat pada rakyat (*people centered development*) menempatkan individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat, dan kekhasan lokal, serta kearifan lokal.

Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat yang inklusif dilakukan dengan melibatkan, dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat melalui keberpihakan pemerintah (*affirmative*) kepada kelompok yang terpinggirkan atau termarginalisasi, untuk memastikan semua kelompok masyarakat, tanpa kecuali, memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi.

Pembangunan inklusif yang berpusat pada rakyat mengedepankan pemberdayaan rakyat, sekaligus partisipasi rakyat. Partisipasi merupakan proses aktif, di mana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berpikir

mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) di mana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif.

Kemampuan elemen masyarakat yang tertinggal ditingkatkan melalui pengembangan dan dinamisasi potensi yang mereka miliki, atau memberdayakannya. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Kemampuan penduduk miskin atau mereka yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya, akan meningkat, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga diri mereka (*nguwongke-wong*), serta terpeliharanya tatanan nilai budaya lokal.

Pemberdayaan sebagai implementasi dari pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya, sehingga partisipasi rakyat akan meningkat menjadi emansipasi rakyat. Tujuan akhir pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat, dan membangun kemampuan memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung, dan berdaya saing.

Strategi *people-centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable* tersebut lebih luas dari semata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*). Konsep ini merupakan strategi pembangunan alternatif, yang menghendaki adanya demokrasi inklusif (*inclusive democracy*), pertumbuhan ekonomi yang memadai (*appropriate economic growth*), kesetaraan gender, dan *intergenerational equity*.

Pengembangan demokrasi harus memiliki dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan memiliki korelasi dengan upaya membebaskan *wong cilik* dari kemiskinan. Dengan pemahaman seperti ini, mengutip pemikiran Amartya Sen, penerima penghargaan Hadiah Nobel bidang Ilmu Ekonomi pada 1998, ide demokrasi secara esensial sangat berkaitan dengan praktik penalaran publik (*public reasoning*).

Penalaran publik dapat diartikan sebagai “alasan seluruh warganegara di dalam masyarakat yang majemuk”, yang dapat memfasilitasi perbedaan pendapat dalam berbagai masalah dengan alasan yang dapat diterima oleh bermacam orang dan/atau berbagai kelompok atau golongan masyarakat. Penalaran publik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan adalah pemerintahan yang senantiasa membuka diskusi publik, yang berlangsung sebagai perluasan kebebasan sipil, kebebasan politik, dan partisipasi, ditunjang oleh berfungsinya perangkat *rule of law* yang menyangga seluruh instrumen pemerintahan yang demokratis.

Demokratisasi yang berkembang dalam ruang sipil dan politik harus menghasilkan perbaikan substansial untuk reformasi hukum, pemerintahan, dan representasi politik. Pemerintahan demokratis harus memiliki kemampuan membongkar berbagai kendala struktural dalam mentransformasikan demokrasi sebagai penalaran publik demi pemajuan hak sosial dan ekonomi rakyat. Tanpa kemampuan itu, demokratisasi substansial yang diidealkan akan mengalami kebangkrutan, yang antara lain, ditandai merebaknya fenomena marjinalisasi, dan makin melemahnya kapasitas, serta kapabilitas masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Di sinilah pentingnya pemahaman ide demokrasi dalam praktik penalaran publik sebagai isi dari hakikat berdemokrasi. Bagaimana kita mampu meningkatkan kapasitas masyarakat miskin untuk mengubah hubungan-hubungan kekuasaan, dan memajukan kebijakan-kebijakan alternatif yang berpihak kepada mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan, memfasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin melalui pembentukan lembaga-lembaga berbasis komunitas lokal, meminjam konsep pemikiran Jurgen Habermas, sebagai “ruang publik deliberatif”, yang sekaligus merupakan sebuah inovasi sosio-kultural yang berbasis pada ruang komunitas lokal untuk memprakarsai perubahan kontekstual.

Melalui “ruang publik deliberatif”, yang dalam bahasa lebih sederhana disebut “musyawarah warga” atau “rembug warga”, dapat dibangun upaya mengaktifkan para individu sebagai warganegara untuk berkomunikasi dan berdialog dalam sebuah ruang publik, yang hasilnya mampu mempengaruhi pengambilan keputusan publik pada level sistem politik. Ruang publik merupakan tempat di mana penalaran

publik diuji dan dikontestasikan. Dari sini bisa dibangun titik awal untuk membangun proses penalaran sebagai cara untuk menghapuskan ketidakadilan.

Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan pada musyawarah dan mufakat melalui penggalian masalah lewat dialog dan tukar pengalaman di antara warga. "Rembug warga" atau "ruang publik deliberatif" menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji masalah yang dijumpai di daerahnya melalui penalaran publik, sekaligus menjadi penyambung keterputusan hubungan atau diskoneksi antara institusi formal demokrasi dan para konstituen yang diwakilinya.

Inti dari demokrasi deliberatif adalah partisipasi warga secara langsung, dan tidak mengenal keterwakilan (*representation*), maupun istilah mayoritas dan minoritas. Demokrasi deliberatif mengutamakan kerja sama antar-ide dan antar-pihak. Demokrasi deliberatif, atau demokrasi musyawarah, lebih menonjolkan argumentasi, dialog saling menghormati, dan berupaya mencapai titik temu dan mufakat. Proses demokrasi deliberatif mendorong kompetensi komunikatif warga, yang memungkinkan setiap individu, tanpa kecuali, termasuk kaum marjinal, menyuarakan kebutuhannya.

"Rembug warga" merupakan pengejawantahan demokrasi deliberatif di tingkat lokal, yang memungkinkan terjadinya interaksi, komunikasi, dan dialog antar-warga yang mengedepankan penalaran publik. Pranata "rembug warga" merupakan pengorganisasian swadaya di tingkat komunitas yang menumbuhkan proses penyadaran kolektif, karena peserta "rembug warga" adalah warga aktif yang hadir bukan semata memenuhi undangan, tetapi sebagai pihak yang memiliki agenda itu sendiri.

Membangun "ruang publik deliberatif" merupakan sebuah upaya menemukan "jalan lain" untuk menjembatani demokrasi elitis dan demokrasi partisipatoris, sekaligus sebagai "jalan tengah" atau "struktur tengah" antara sistem politik dan sektor privat. "Ruang publik deliberatif" bisa berfungsi sebagai mata rantai untuk menghubungkan secara horisontal prakarsa masyarakat miskin melalui partisipasi publik langsung. Ini merupakan bentuk demokrasi partisipatoris-deliberatif sebagai

alternatif terhadap demokrasi representatif, di mana potensi rakyat miskin bisa diberdayakan melalui "ruang publik deliberatif".

Ide mengenai demokrasi memiliki korelasi dengan upaya membebaskan rakyat dari kemiskinan, dan mensejahterakan rakyat. Komunikasi, dialog, interaksi publik, dan partisipasi politik merupakan kata kunci dalam praktik demokrasi. Jika demokrasi dipahami sebagai proses penalaran publik yang terbuka, maka pemerintah harus membuka ruang untuk mendengar suara-suara yang berbeda dalam mengupayakan solusi bagi masalah yang dihadapi rakyat secara terbuka, termasuk mendengarkan yang tak terdengar (*hearing the unheard*). Pemerintah tidak boleh menutup katup atau saluran bagi suara-suara yang berbeda, termasuk juga suara-suara yang tak terungkap. Dengan kata lain, kita harus membangun sistem yang menjamin kebebasan rakyat untuk berbicara dan berpendapat yang memiliki korelasi dengan kebebasan dari kemiskinan.

Demokrasi harus memberi ruang kondusif bagi pembangunan agar pembangunan bukan sekadar dipahami sebagai capaian tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan akhir, tetapi juga harus dipahami sebagai pengembangan ekonomi yang menyangkut perhatian pada hakikat kehidupan manusia itu sendiri, dan kebebasan yang dapat mereka nikmati, sebagai sesuatu yang esensial dari ide mengenai pembangunan. Dengan demikian, pembangunan tidak cukup hanya mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pengentasan rakyat miskin, peningkatan pendapatan rakyat yang memperhatikan pemerataan berkeadilan, peningkatan alokasi dana untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya, yang dapat makin memperluas dan meningkatkan kualitas kehidupan dan kapabilitas rakyat.

Demokrasi juga harus ditekankan pada makna keadilan sosial, terutama konsep keadilan pada gagasan tentang kebebasan, kesetaraan, dan imbalan bagi tindakan yang memberikan sumbangan untuk keuntungan bersama. Prinsip kebebasan harus mengacu pada kebebasan yang setara, di mana prinsip hak dan kewajiban menjadi dasar utama bagi kebebasan.

Paradigma keadilan memiliki dua prinsip, yang pertama, bahwa setiap orang harus memperoleh hak atas kebebasan dasar yang paling luas, dan sejalan dengan

kebebasan yang sama bagi orang yang lain. Prinsip ini dibutuhkan untuk menjamin kebebasan dasar, yakni kebebasan berpikir, berkehendak, berpendapat, berkumpul, memilih, kebebasan untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang, hak untuk memiliki jabatan publik, dan kepemilikan pribadi. Kedua adalah prinsip perbedaan, yang memperbolehkan terjadinya ketidaksetaraan secara sosial dan ekonomi hanya jika memaksimalkan keuntungan bagi rakyat yang paling tidak diuntungkan, dan kesetaraan yang adil dalam memperoleh kesempatan bagi semua. Kesetaraan ini tidak hanya berarti kesetaraan dalam kesempatan kerja, tetapi juga kesempatan hidup. Kalau pun kita harus menerima ketidaksetaraan, seperti perbedaan perolehan keuntungan dalam strata ekonomi, di mana prinsip imbalan menjadi acuan, maka harus melalui cara yang adil, sehingga dalam konteks ini, prinsip keadilan telah berjalan sebagaimana mestinya.

### **VI.1.2 Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor growth*)**

Strategi pemberdayaan rakyat melepaskan diri dari perangkap *trade off* pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (*trade-off*) satu terhadap lainnya. Pemerataan akan menciptakan landasan lebih luas bagi pertumbuhan, dan menjamin pertumbuhan berkelanjutan, karena pola pertumbuhan adalah sama pentingnya dengan kecepatan pertumbuhan. Pola pertumbuhan yang tepat bukan yang vertikal, menghasilkan *trickle-down*, seperti yang telah terbukti tidak berhasil, tetapi haruslah yang bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni *broadly based, employment intensive*, dan tidak terkompartementalisasi.

Pertumbuhan ekonomi yang berjalan serempak dengan pemerataan merupakan pertumbuhan yang ramah bagi penduduk miskin, disebut *pro-poor growth*, yakni pertumbuhan ekonomi yang memperluas kesempatan dan kapabilitas penduduk miskin untuk lebih berpartisipasi, dan memperoleh manfaat lebih besar dari aktivitas ekonomi (Kimenyi, 2006). Sebuah pertumbuhan ekonomi belum cukup dikategorikan sebagai *pro-poor growth* jika hanya menyebabkan menurunnya jumlah penduduk miskin, dengan mengabaikan ketimpangan peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi disebut *pro-poor growth* jika proporsi peningkatan rata-rata

pendapatan kelompok penduduk miskin lebih besar daripada proporsi peningkatan pendapatan kelompok penduduk yang tidak miskin (Kakwani and Pernia, 2000).

Strategi *pro-poor growth* secara konseptual memiliki definisi berbeda dengan strategi *pro-poor* dan *pro-growth* yang masing-masing berdiri terpisah, meski di dalam strategi *pro-poor growth* secara implisit juga mengandung unsur *pro-poor*, *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-environment*. Namun ketika keempat unsur tersebut tergabung di bawah konsep strategi *pro-poor growth*, maka melahirkan definisi baru yang berbeda dengan definisi masing-masing unturnya. Strategi *pro-poor growth* juga bukan sekadar hasil penjumlahan dari keempat unsur tersebut.

Meski demikian, upaya mencapai *pro-poor growth*, tidak dapat dilepaskan dari kandungan unsur strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*, yang masing-masing memiliki kontribusi untuk mewujudkan proporsi peningkatan rata-rata pendapatan kelompok penduduk miskin lebih besar daripada proporsi peningkatan pendapatan kelompok penduduk yang tidak miskin. Pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) harus dapat menciptakan lapangan kerja (*pro-job*), dan pendapatan yang lebih baik bagi semua golongan masyarakat, terutama penduduk miskin (*pro-poor*), serta pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan (*pro-environment*).

Melalui strategi tersebut, diharapkan pertumbuhan dan pemerataan mampu berjalan serempak, sehingga pertumbuhan ekonomi melibatkan, menyentuh, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi semua, termasuk penduduk miskin, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi pada saat yang sama disertai penurunan jumlah penduduk miskin, dan juga penurunan ketimpangan pendapatan.

### **VI.1.3 Pengarusutamaan gender (*pro-gender*)**

Strategi umum pembangunan Jawa Timur dijalankan dengan pengarusutamaan gender untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, di mana pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi, harus responsif gender. Laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai pelaku (subjek) yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan.



Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dilaksanakan dengan membuka kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, agar dapat memberikan manfaat bagi perempuan yang setara dengan laki-laki.

## **VI.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

Ketiga strategi umum tersebut menjadi pijakan utama penetapan dan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan Jawa Timur 2014-2019. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi diuraikan dalam Tabel 6.1:

**Tabel 6.1**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah**  
**Provinsi Jawa Timur, 2014-2019**

Visi: "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak"				
Misi: "Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik"				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan</b>	1. Meningkatkan perluasan lapangan kerja	1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja	1. Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan	1. Pengembangan dan pemberdayaan agroindustri berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian lokal yang dapat menyerap tenaga kerja
				2. Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, <i>job fair</i> , magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
			2. Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kompetensi, serta keterampilan tenaga kerja	1. Pengembangan usaha produktif melalui kewirausahaan untuk menciptakan tenaga kerja mandiri dan produktif
				2. Optimalisasi dan pengembangan kapasitas dan pendayagunaan UPT Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) berstandar internasional, serta perluasan skala pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berkualitas
			3. Meningkatkan penempatan penduduk potensial di daerah transmigrasi	Peningkatan dan pengembangan kerja sama program transmigrasi dengan provinsi/kabupaten di luar Jawa
			4. Meningkatkan pengembangan kapasitas para santri pondok pesantren dalam bidang usaha produktif	Peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, untuk melakukan usaha produktif
5. Meningkatkan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar negeri			Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang akan, dan sedang bekerja di luar negeri melalui pembinaan, perlindungan dan pengawasan terpadu	

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
<b>MISI 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan</b>	1. Meningkatkan perluasan lapangan kerja	2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Meningkatkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif	1. Peningkatan investasi melalui perbaikan iklim investasi untuk menciptakan kesempatan kerja baru		
				2. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif		
	2. Meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan	1. Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas	1. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau	1. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau	1. Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	
					2. Penurunan/penghilangan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan, dan sekolah khusus	
					2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan	1. Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah
					2. Peningkatan dan pengembangan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara ( <i>bridging program</i> ) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi	
		2. Meningkatnya kuantitas, dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD)	1. Meningkatkan aksesibilitas, dan kualitas PAUD	1. Meningkatkan aksesibilitas, dan kualitas PAUD	Pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu	
					Peningkatan pemerataan dan akses PAUD, khususnya di daerah tertinggal, dan wilayah kepulauan	
		3. Meningkatnya mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan	2. Meningkatkan kualitas, dan layanan pendidikan	2. Meningkatkan kualitas, dan layanan pendidikan	1. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata	
					2. Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas	
3. Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi						
3. Meningkatkan minat baca masyarakat	3. Meningkatkan minat baca masyarakat	3. Meningkatkan minat baca masyarakat	4. Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta			
			Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu			

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan</b>	2. Meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan	4. Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga	1. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas	Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan
			2. Meningkatkan perlindungan bagi masa depan generasi muda	Peningkatan perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, dan penyebaran HIV/AIDS
			3. Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
	3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata	1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan	Peningkatan perluasan pelayanan kesehatan pondok bersalin desa (polindes) menjadi pondok kesehatan desa (ponkesdes) untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan
			2. Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas dan jaringannya sesuai standar kesehatan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas, dan jaringannya sesuai standar kesehatan
			3. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan non-medis, serta perbekalan obat-obatan	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis, serta non-medis, dan obat-obatan, secara merata sesuai standar kesehatan
		2. Menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu melahirkan	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, dan balita	Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan balita melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" di setiap desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos PAUD, dan Bina Keluarga Balita (BKB).
		3. Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	1. Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya	Peningkatan standarisasi pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya secara merata
			2. Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif yang lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengenyampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
<b>MISI 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan</b>	3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan melalui mekanisme Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) yang komprehensif dan terpadu	Pengembangan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk Jawa Timur	
			2. Meningkatkan layanan kesehatan bagi penduduk miskin	Peningkatan upaya meminimalkan hambatan keuangan bagi penduduk miskin dan rentan dalam mengakses pelayanan kesehatan	
		5. Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan reproduksi	Meningkatkan layanan KB, dan kesehatan reproduksi secara komprehensif dan berkelanjutan	Peningkatan dan penguatan revitalisasi program KB untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga	
	4. Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan	1. Menurunnya persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan		1. Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar-sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu ("lokus-fokus")	1. Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program
					2. Peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin
					3. Peningkatan, dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin
				2. Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil untuk menurunkan tingkat kemiskinan	Pengembangan dan perlindungan keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah
				3. Meningkatkan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (Kube)	Peningkatan kualitas manajemen Kube yang memiliki kemampuan dan keberdayaan secara sosial maupun ekonomi
4. Mengoptimalkan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri melalui konsep dan metode belajar sosial				

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan</b>	4. Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan	1. Menurunnya persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan	5. Meningkatkan akses dan fasilitas infrastruktur bagi penduduk miskin	1. Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah
				2. Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin
		2. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS	Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial
		3. Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan	Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk menanggulangi feminisasi kemiskinan	1. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non-perbankan
				2. Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan
		3. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan		
		4. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan		
	4. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan	Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan	

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
<b>MISI 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi</b>	1. Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi	1. Meningkatnya volume usaha UMKM, dan kualitas kelembagaan koperasi	1. Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-perbankan	1. Perluasan jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada UMKM untuk kelancaran pembiayaan usaha  2. Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan <i>idle money</i>  3. Peningkatan perluasan jaringan Bank UMKM di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan	
			2. Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi	1. Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran  2. Optimalisasi peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi  3. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional  4. Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai  5. Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil  6. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi	
			2. Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)	Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru	Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi</b>	2. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan)	1. Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, daging, telur, susu, dan ikan, untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri)
			2. Meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Penetapan dan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
			3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir	Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan
			4. Meningkatkan pengembangan aneka usaha di kawasan hutan, dan usaha hutan rakyat	Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan, sekitar hutan, serta pengembangan usaha non-kayu di kawasan hutan
		2. Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	1. Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	Peningkatan nilai tambah ( <i>value added</i> ) sektor pertanian melalui perluasan penciptaan kawasan agropolitan dan agroindustri yang memiliki keterkaitan ke belakang ( <i>backward linkage</i> ) dan ke depan ( <i>forward linkage</i> ) pada sebaran lokasi potensial yang merata
			2. Meningkatkan kualitas proses dan produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan) yang terstandarisasi	Peningkatan daya saing produk pertanian, dengan tetap melakukan perlindungan produk lokal, melalui peningkatan kualitas menuju standar mutu yang dipersyaratkan pada berbagai kawasan perdagangan
		3. Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi	Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan secara berkelanjutan dan terpadu	Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi	3. Meningkatkan ketahanan pangan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat ( <i>food availability</i> )	Meningkatkan stok pangan masyarakat	Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, antara lain meliputi daging, beras, gula, kedelai, dan jagung
		2. Meningkatnya penyerapan pangan ( <i>food utilization</i> )	1. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan	Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal
			2. Meningkatkan penanganan keamanan pangan	Pengembangan pengawasan keamanan pangan
		3. Meningkatnya akses pangan ( <i>food acces</i> )	1. Meningkatkan kelancaran distribusi pangan	1. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan
				2. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat
				3. Peningkatan peran pasar induk dalam distribusi pangan
		2. Menjaga stabilitas harga pangan	Pengendalian harga pangan pokok, dan pengembangan sistem informasi pasar (pasokan, harga dan akses)	
	4. Meningkatkan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri	Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri	1. Memperkuat dan memperluas pasar dalam dan luar negeri	Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang
			2. Meningkatkan kerja sama ekonomi lokal, regional dan internasional	Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional
			3. Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal	1. Revitalisasi Puspa Agro menjadi <i>trading house</i> produk pertanian Jawa Timur
				2. Perluasan dan peningkatan substansi pameran dagang produk UMKM di pasar domestik maupun internasional
			3. Peningkatan performa standarisasi Industri	
	4. Mengembangkan bahan baku substitusi impor	Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor		
5. Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri	Meningkatnya kontribusi sektor industri	Meningkatkan pengembangan sektor industri	1. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah non-agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki <i>backward</i> dan <i>forward linkage</i> yang tinggi	
			2. Peningkatan fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil	
			3. Peningkatan fasilitasi penumbuhkembangan industri pengolahan agro dan non-agro	

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
<b>MISI 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi</b>	6. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	1. Meningkatnya kunjungan wisata	Meningkatkan sektor pariwisata secara integratif, dan berdaya saing global	1. Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan	
				2. Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional	
				3. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata	
				4. Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing	
				5. Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas lokal	
	2. Meningkatnya kualitas seni budaya lokal		Meningkatkan pengembangan kualitas, dan pelestarian warisan seni budaya lokal	6. Peningkatan fasilitas kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar	
				1. Peningkatan penyelenggaraan festival seni budaya lokal pada event nasional dan internasional	
				2. Peningkatan fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya lokal	
	7. Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri, serta investasi daerah	Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah		1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	3. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air
					1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif
2. Pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan					
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung investasi					
3. Meningkatkan promosi investasi secara terpadu					Peningkatan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, nasional, dan internasional

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi</b>	8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat	1. Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut, dan udara	1. Meningkatkan konektivitas ekonomi melalui ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal	1. Pengembangan transportasi untuk mendukung sentra produksi agropolitan, dan sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi, serta kawasan andalan untuk mendukung sentra produksi pada 38 simpul kabupaten/kota
				2. Pengembangan pembangunan dermaga/transportasi antar-pulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal, terutama di wilayah Kepulauan Madura, dan pulau-pulau lainnya
				3. Pengembangan jalur komuter perkeretaapian, dan pengembangan rel perkeretaapian ganda ( <i>double track</i> )
				4. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi jalan
			2. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan darat, laut dan udara yang efisien dan efektif	1. Pengembangan perluasan sistem angkutan umum, termasuk <i>busway</i> /monorel
				2. Pengembangan terminal kelas A, B dan C, serta optimalisasi terminal kargo dan peti kemas
				3. Peningkatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum
				4. Pengembangan pembangunan pelabuhan khusus
				5. Peningkatan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Juanda dan Abdul Rahman Saleh Malang
				6. Peningkatan pembangunan dan pengembangan bandar udara perintis untuk penerbangan antar-kota ( <i>city link</i> )
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum, dan sanitasi	1. Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi	Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi dengan harga terjangkau		
	2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah	Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah		

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi</b>	8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat	3. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, dan penyediaan data serta informasi sumber daya air	1. Meningkatkan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan	1. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi waduk, dam, dan embung
				2. Peningkatan rehabilitasi kerusakan daerah tangkapan air ( <i>catchment area</i> ) dan sumber air
				3. Peningkatan upaya mempertahankan sumber air, dan merehabilitasi resapan untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun
			2. Mengendalikan daya rusak air, serta pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat	1. Peningkatan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan
				2. Peningkatan percepatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang menunjang pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan
				3. Peningkatan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)
			4. Peningkatan pembangunan embung berteknologi geo-membran di lokasi rawan kekeringan, jauh dari sumber air dan kondisi tanah porus, sebagai solusi jangka pendek mengantisipasi bencana kekeringan	
		4. Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi	1. Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan sumber energi	Pengembangan dan peningkatan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang potensial, terutama sebagai sumber energi listrik, dan berbagai keperluan lainnya
			2. Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan pasokan listrik	Pengembangan dan peningkatan pembangunan jaringan, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN
			3. Mengembangkan pengelolaan kelistrikan, energi, minyak dan gas	Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan kelistrikan, energi, minyak dan gas
4. Meningkatkan pembinaan usaha pertambangan dan pengelolaan air tanah	Peningkatan kapasitas pelaku pertambangan dan efisiensi penggunaan air tanah			
5. Meningkatnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan informasi dan komunikasi	Pengembangan informasi dan teknologi tepat guna melalui diseminasi informasi dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat		

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI 3: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang</b>	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan pemeliharaan kelestariannya	1. Meningkatnya luas hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi	Meningkatkan pengendalian, perluasan, dan rehabilitasi hutan	Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan, dengan memilih tanaman pohon bermasa tumbuh relatif pendek
		2. Meningkatnya sumber daya air terkonservasi	Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, dan peningkatan fungsi jaringan irigasi	1. Peningkatan upaya konservasi sumber daya air untuk mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasokan sumber daya air, di samping untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, juga air irigasi pertanian rakyat  2. Pengembangan penyediaan air irigasi melalui peningkatan fungsi jaringan irigasi, rehabilitasi, dan peningkatan kinerja operasi, serta pemeliharaan dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan kesiapan petani
		3. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama sumber daya air, DAS, dan wilayah pesisir, serta laut	Meningkatkan partisipasi aktif seluruh <i>stakeholder</i> dalam upaya menjaga sumber daya air, sungai, pesisir, dan laut	1. Pengembangan kelembagaan pengelolaan sumber daya air melalui peningkatan peran dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, serta menggali dan mengembangkan modal sosial, merevitalisasi peran lokal tradisional dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air untuk irigasi pertanian  2. Pemberdayaan komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang daerah aliran sungai untuk mengawasi pencemaran air sungai, dan memelihara lingkungan hidup  3. Peningkatan upaya konservasi pesisir dan laut, merehabilitasi ekosistem yang rusak, serta menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut  4. Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam
	2. Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan	1. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	1. Mengembangkan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah	Penetapan Rencana Kawasan Strategis Provinsi untuk mendorong pengembangan wilayah
			2. Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi	Peningkatan rasio ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Provinsi
		2. Meningkatnya fasilitasi tentang perlindungan terhadap luasan lahan pertanian	Menetapkan dan mempertahankan luasan LP2B dalam rangka swasembada beras	Peningkatan fasilitasi upaya mendorong luasan LP2B dalam rangka swasembada beras

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI 4: Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik</b>	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ), dan bersih ( <i>clean government</i> ), serta profesionalisme pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	1. Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemerintahan	Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya
			2. Meningkatkan manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional	Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik
		2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan melalui perumusan standar pelayanan minimal yang diketahui, dan dipantau pelaksanaannya oleh masyarakat
			2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik secara efisien dan efektif	Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
				Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan <i>up to date</i>
		3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas SKPD	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD
		4. Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya	Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan
		5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu
		6. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	1. Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	Peningkatan profesionalisme pengelolaan arsip pemerintah daerah didukung sistem kearsipan yang komprehensif
			2. Meningkatkan kualitas dokumen statistik yang akurat dan valid	Peningkatan ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan <i>up to date</i>

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI 5: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial</b>	1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama	1. Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah	1. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
		2. Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama	Meningkatkan kerukunan antar-umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi	2. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama, serta beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing
				3. Peningkatan revitalisasi dan perbaikan situs-situs religi
	2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman, dan tertib	1. Memelihara kewaspadaan nasional untuk menangkal upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban	1. Peningkatan dan penguatan kerukunan internal, dan antar-umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati
				2. Peningkatan jaringan kerja sama lintas umat beragama, dan forum silaturahmi lintas pemuka agama, serta mendorong berkembangnya kerja sama internal dan/atau antar-umat beragama di bidang sosial ekonomi
				3. Pengembangan resolusi konflik dalam mengatasi konflik sosial berdimensi agama, suku, ras maupun antar-golongan
2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman, dan tertib	1. Memelihara kewaspadaan nasional untuk menangkal upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban	Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba, serta terorisme	
			2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan komunitas	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban melalui mekanisme <i>community policing</i>
			3. Meningkatkan aktivitas yang mendorong rasa kebanggaan kebangsaan (nasionalisme), dan sikap saling menghormati antar-sesama melalui pengembangan wawasan kebangsaan yang berkesinambungan	Peningkatan fasilitasi aktivitas yang menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme, akhlak mulia, serta kemampuan untuk hidup bersama dalam masyarakat multikultur

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
<b>MISI 5: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial</b>	3. Meningkatkan penguatan kearifan lokal ( <i>local wisdom</i> )	Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial	Meningkatkan kualitas, dan pelestarian warisan budaya, serta tradisi lokal	Revitalisasi budaya dan tradisi lokal untuk mendukung pembangunan partisipatoris berbasis komunitas		
				Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat		
	4. Meningkatkan penegakan supremasi hukum, dan penghormatan hak azasi manusia (HAM) yang berkeadilan	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM	Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum dan HAM	Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum		
				2. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM	Meningkatkan kegiatan forum masyarakat dalam bidang hukum dan HAM	Peningkatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
				3. Meningkatnya penguatan <i>civil society</i> dalam bidang hukum dan HAM	Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat/LSM dalam bidang hukum dan HAM	Peningkatan keberdayaan organisasi kemasyarakatan/LSM dalam mencegah, dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi, serta pelanggaran HAM lainnya, sebagai bagian penguatan <i>civil society</i>